



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. R.E. Martadinata No. 9 Telp. (0414) 22587 Benteng

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 019 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS

KEGIATAN (PPTK)

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya penggunaan Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja Daerah dan Barang Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi

Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 120);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 748);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam ampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran.
 3. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

4. Membantu PPK dalam kegiatan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 2 Januari 2023 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 9 Januari 2023

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**



Drs. SUARDI

**Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670705 199403 1 020**

Tembusan :

1. Sekretaris Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
5. Kabag. Pembangunan Setda di Benteng.

LAMPIRAN
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 NOMOR 019 TAHUN 2023
 TENTANG
 TETANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
 (PPTK) ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
 KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2023

**DAFTAR NANA-NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
 DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAAN	PPTK (NAMA/NIP)	ANGGARAN	JABATAN
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
A	Kegiatan Perencanaan, Pengganaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	ANDI NASLIYANTO L., A.Md. NIP. 19800301 200801 1 023	Rp 4.240.000	Kasubag. Program
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	ANDI NASLIYANTO L., A.Md. NIP. 19800301 200801 1 023	Rp 3.500.000	Kasubag. Program
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	ANDI NASLIYANTO L., A.Md. NIP. 19800301 200801 1 023	Rp 3.500.000	Kasubag. Program
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	ANDI NASLIYANTO L., A.Md. NIP. 19800301 200801 1 023	Rp 3.500.000	Kasubag. Program
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	ANDI NASLIYANTO L., A.Md. NIP. 19800301 200801 1 023	Rp 3.500.000	Kasubag. Program
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	ANDI NASLIYANTO L., A.Md. NIP. 19800301 200801 1 023	Rp 5.000.000	Kasubag. Program
B	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	MUH. THAMRIN, SE NIP. 19810218 200903 1 003	Rp 4.282.330.725	Kasubag. Keuangan
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	MUH. THAMRIN, SE NIP. 19810218 200903 1 003	Rp 5.000.000	Kasubag. Keuangan
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	MUH. THAMRIN, SE NIP. 19810218 200903 1 003	Rp 5.000.000	Kasubag. Keuangan
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	MUH. THAMRIN, SE NIP. 19810218 200903 1 003	Rp 5.000.000	Kasubag. Keuangan
C	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DEWI ANRIANI, S.Si. NIP. 19821224 201101 2 011	Rp 3.000.000	Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Hukum
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DEWI ANRIANI, S.Si. NIP. 19821224 201101 2 011	Rp 34.680.000	Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Hukum
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DEWI ANRIANI, S.Si. NIP. 19821224 201101 2 011	Rp 11.132.000	Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Hukum
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	ANDI NASLIYANTO L., A.Md. NIP. 19821224 201101 2 011	Rp 121.000.000	Kasubag. Program
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DEWI ANRIANI, S.Si. NIP. 19821224 201101 2 011	Rp 10.008.000	Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Hukum
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	ANDI NASLIYANTO L., A.Md. NIP. 19821224 201101 2 011	Rp 225.066.000	Kasubag. Program
D	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	MUH. THAMRIN, SE NIP. 19821224 201101 2 011	Rp 130.902.000	Kasubag. Keuangan
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DEWI ANRIANI, S.Si. NIP. 19821224 201101 2 011	Rp 620.328.000	Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Hukum
E	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	MUH. THAMRIN, SE NIP. 19800301 200801 1 023	Rp 38.630.000	Kasubag. Keuangan

I	2	3	4	5
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	MUH. THAMRIN, SE NIP. 19800301 200801 1 023	Rp 246.920.000	Kasubag. Keuangan
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	MUH. THAMRIN, SE NIP. 19810218 200903 1 003	Rp 18.020.000	Kasubag. Keuangan
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	MUH. THAMRIN, SE NIP. 19810218 200903 1 003	Rp 20.000.000	Kasubag. Keuangan
II PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
A Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				
1	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Ir. FATRECIA IMELDA, M.M. NIP. 19730203 201001 2 002	Rp 35.000.000	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
B Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Ir. FATRECIA IMELDA, M.M. NIP. 19730203 201001 2 002	Rp 262.500.000	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	MURSALIM, S.Sos, M.M NIP. 19841207 201101 1 010	Rp 270.000.000	Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan
C Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	BASO ANDI KARAENG, A.Md NIP. 19820227 200801 1 012	Rp 66.646.000	Kepala UPT. Terminal dan Perparkiran
D Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				
1	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Ir. FATRECIA IMELDA, M.M. NIP. 19730203 201001 2 002	Rp 20.000.000	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
1	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Ir. FATRECIA IMELDA, M.M. NIP. 19730203 201001 2 002	Rp 80.000.000	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
III PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				
C Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				
1	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	MURSALIM, S.Sos, M.M NIP. 19841207 201101 1 010	Rp 2.671.947.300	Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan
2	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	SYAMSUL QADRI, A.Md NIP. 19770918 200801 1 013	Rp 123.523.000	Kepala UPT. Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Darat Pelabuhan Pamatata
PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN				
C Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter				
1	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Ir. FATRECIA IMELDA, M.M. NIP. 19730203 201001 2 002	Rp 214.396.000	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

Drs. SUARDI

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19670705 199403 1 020